

✓

Kebijakan Amerika dan Indonesia terhadap Timor Timur dalam Perspektif *Containment Policy*

Oleh **Siswanto**

Sejak tanggal 17 Juli 1976 Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia, demikian pandangan Pemerintah Orde Baru (OrBa), walaupun sebagian masyarakat internasional masih memperlmasalahkannya. Timor timur (TimTim) memiliki luas wilayah 14.874 km, dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari pegunungan dan 1/3 wilayahnya terdiri dari dataran rendah. Perekonomian TimTim mengandalkan sektor perkebunan, seperti kopi, kelapa, padi, jagung, kacang hijau, dan peternakan lembu dan kuda (Shadily, 1980). TimTim memiliki 13 Kabupaten, yaitu: 1). Aileu, 2). Ainaro, 3). Ambeno, 4). Baukau, 5). Bobonaro, 6). Dili, 7). Ermera, 8). Kovalima, 9). Lautem, 10). Likisia, 11). Manatuto, 12). Manufali, 13). Vikeke (Shadily). TimTim memiliki Pusat Pemerintahan di Dili.

Sebelum berintegrasi dengan Indonesia TimTim adalah koloni Portugal. Dengan adanya kudeta di Portugal atau Revolusi Bunga, maka Portugal melaksanakan dekolonisasi terhadap TimTim (Lapian:1988). Rakyat TimTim yang belum siap menerima dekolonisasi tersebut akhirnya justru terlibat perang saudara yang berkepanjangan. Dalam perang saudara ini, Fretilin merupakan kekuatan politik yang berhaluan komunis, dan dalam perang saudara ini Fretilin hampir keluar sebagai pemenang, karena Fretilin telah berhasil mengontrol sebagian besar wilayah TimTim.

Aspirasi politik Fretilin hendak mendirikan negara TimTim yang berhaluan Komunis. Hal ini menimbulkan kecemasan dipihak Indonesia maupun Amerika, karena kedua negara ini menentang Komunisme. Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan Komunisme, karena Partai Komunis Indonesia dua kali melakukan kudeta berdarah, yaitu tahun 1948 dan 1965, sehingga keberadaan Komunisme sangat dicurigai oleh Pemerintah Indonesia dimasa OrBa. Apalagi

diperkirakan akan muncul negara Komunis yang berada satu pulau dengan salah satu pulau di Indonesia. Amerika memandang rencana munculnya negara komunis di TimTim akan mempengaruhi hegemoninya di Asia Pasifik, karena Amerika memiliki peran kepemimpinan dan pemegang kendali stabilitas keamanan di Asia Pasifik. Amerika menghawatirkan Uni Soviet atau Republik Rakyat Cina saat itu akan memanfaatkan keberadaan negara komunis tersebut untuk menekan dirinya, sehingga akan merugikan kepentingan politik globalnya.

Persoalannya adalah bagaimana upaya Amerika dan Indonesia untuk menghalangi berdirinya negara komunis di TimTim saat itu dan bagaimana orientasi politik Amerika dan Indonesia terhadap TimTim saat ini ?

Realisme Politik merupakan salah satu pendekatan yang dipandang relevan untuk melihat upaya Amerika dan Indonesia dalam menahan berdirinya negara Komunis tersebut. Seperti diketahui dalam Realisme Politik kebijakan luar negeri suatu negara dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu :1). Pola Imperialistik, yang bersifat mengubah tatanan politik 2). Pola Status Quo yang bersifat mempertahankan tatanan politik, dan 3). Pola Prestise yang bersifat memperagakan kekuatan untuk mendukung kedua pola terdahulu (Morgenthau:1962).

Morgenthau (1962) sebagai tokoh Realisme melihat bahwa suatu negara, untuk melaksanakan pola Status Quo memerlukan suatu strategi yang disebut *Containment Policy*, yaitu kebijakan politik yang sifatnya membendung negara lain khususnya negara komunis atau yang memiliki potensi munculnya Komunisme. Oleh karena itu suatu negara yang melakukan pola imperialistik dapat dilawan dengan pola Status Quo, dan untuk melaksanakan pola status quo tersebut digunakan strategi *containment policy*.

Dengan demikian *containment policy* menjadi strategi dari pola status quo untuk menghadapi pola imperialistik. *Containment Policy* memiliki fungsi menggagalkan dan mengeliminir tujuan politik yang diperkirakan akan memiliki potensi menjadi kekuatan imperialistik. Karena dalam percaturan politik ketepatan waktu dalam melakukan manuver politik dan pilihan-pilihan strategi juga sangat menentukan kemenangan dalam percaturan politik internasional tersebut, sehingga suatu negara harus cepat mengantisipasi pola dan strategi yang diterapkan dalam menghadapi pola kebijakan negara lain.

1. Amerika dan “*Containment Policy*”

Containment Policy merupakan gagasan yang dikembangkan oleh George Keenan pada tahun 1947. Saat itu Keenan menjalankan tugas sebagai Duta Besar Amerika di Rusia. Keenan mengembangkan gagasan “*containment*” sebagai reaksi atas ancaman Pemimpin Rusia Yoseph Stalin yang meny-

takan bahwa "dunia tidak akan damai sejauh ekonomi dunia dikontrol oleh Kapitalisme." Sejalan dengan ancaman ini Keenan memberi masukan kepada Presiden Amerika Harry S. Truman bahwa Amerika perlu membendung kebijakan Rusia yang cenderung ekspansionis. Kebijakan "Containment" pertama diterapkan kepada Yunani dan Turki; hal ini tercermin pada pidato Truman di depan Konggres bulan Juli 1947 yang menyatakan bahwa Amerika perlu membantu Yunani dan Turki dalam menghadapi pemberontakan Komunis yang mendapat bantuan dari Rusia (Tindall:1984).

Dalam perkembangan selanjutnya *containment policy* menjadi bagian dari strategi Amerika dalam era Perang Dingin melawan Uni Soviet (Rusia) atau Cina. Amerika memiliki daerah pengaruh di berbagai kawasan dunia guna membendung Komunisme, seperti di Korea Selatan, Vietnam Selatan, Yaman Selatan, Jerman Barat, Jepang. Sebaliknya Uni Soviet dan Cina juga memiliki daerah pengaruh yang berperan sebagai agen perluasan Komunisme, antara lain Korea Utara, Yaman Utara, Vietnam Utara, Angola, Cuba, Jerman Timur dan kawasan Eropa Timur lainnya. Tidak mengherankan Amerika dan Uni Soviet serta Cina sering terlibat dalam Proxy Conflict, yaitu konflik tidak langsung antara Amerika dan Uni Soviet atau Cina, melalui negara lain.

Sehari sebelum pengiriman sukarelawan Indonesia ke TimTim tahun 1975 Presiden Amerika Gerald Ford dan Menteri Luar Henry Kissinger mengunjungi Indonesia, sehingga kedua pemimpin Amerika tersebut diduga memiliki hubungan dengan kebijakan Indonesia di TimTim. Amerika diperkirakan mengetahui dan memberi toleransi terhadap pengiriman sukarelawan tersebut. Dukungan dan toleransi Amerika terhadap pengiriman sukarelawan ini dilatarbelakangi oleh persamaan kepentingan, bahwa Amerika dan Indonesia sama-sama tidak menginginkan TimTim berubah menjadi negara Komunis.

Pandangan ini sebagai antisipasi politik mengingat posisi geografi TimTim yang strategis, yakni seandainya TimTim memerdekakan diri dengan faham Komunisnya, maka kemungkinan negara baru ini akan mengundang kehadiran Uni Soviet atau Cina untuk bersekutu. Posisi ini membahayakan kepentingan Amerika di Asia Pasifik, khususnya dalam percaturan politik atau persaingan ideologi, mengingat saat itu dunia masih dilanda Perang Dingin.

Sebelum terlambat dan kalah dalam persaingan ideologi tersebut, maka Amerika memilih segera melakukan *containment* tidak langsung terhadap kemungkinan munculnya negara TimTim. Dalam hal ini Amerika menggunakan Indonesia sebagai pelaku utama untuk mencegah berkembangnya Komunisme dikawasan strategis ini. Amerika tidak memberi bantuan langsung kepada Indonesia tetapi menggunakan Australia sebagai perantaranya. Hal ini bisa terlihat dari upaya Amerika melalui Australia memberi bantuan pesawat pancar gas Sabre kepada Indonesia (*Tem-po*:1975), yang dapat digunakan untuk melakukan

containment tersebut. Amerika juga meyakinkan pihak Australia, agar tidak memberi reaksi nega-tip atas pengiriman sukarelawan Indonesia ke TimTim. Nampaknya permin-taan Amerika dilaksanakan oleh Australia, karena Australia juga bagian dari blok negara-negara liberal, dan terikat dalam aliansi (ANZUS) dengan Amerika. Sikap politik Australia terlihat dari komentar Perdana Menteri Australia saat itu yang menilai integrasi TimTim ke wilayah Indonesia adalah sesuatu yang wajar, seperti halnya integrasi Goa ke wilayah India. Pernyataan ini mengisyaratkan toleransi Australia terhadap kebijaksanaan Indonesia di TimTim.

2. Indonesia dan “*Containment Policy*”

Keberadaan negara Komunis TimTim jelas akan menjadi ancaman bagi Ideologi Pancasila. Karena filosofi kedua ideologi tersebut saling bertentangan. Pancasila di samping sebagai ideologi, juga memiliki fungsi sebagai dasar negara Indonesia, dengan demikian adanya ancaman terhadap dasar negara, maka secara tidak langsung memiliki makna sebagai juga merupakan ancaman terhadap keberadaan negara Indonesia, sehingga rencana hadirnya negara Komunis TimTim menimbulkan kecemasan di kalangan elite OrBa saat itu.

Elite OrBa saat itu juga menjadikan Pancasila sebagai budaya politik dan pandangan hidup bangsa Indonesia; konsekuensinya keberadaan Pancasila sangat dilindungi. Upaya melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sosial politik bisa dilihat dari adanya TAP MPR yang dikenal dengan Eka Prasetya Panca Karsa: yakni Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang kemudian lebih dikenal dengan P4. Pada masa OrBa, P4 menjadi sarana sosialisasi nilai-nilai sosial politik Pemerint-tahan OrBa, walaupun pelaksanaannya dinilai lebih kearah indoktrinasi nilai-nilai Pancasila yang diinterpretasi oleh Pemerintah OrBa (36 butir-butir Pancasila). Pada saat itu hampir semua masyarakat yaitu: karyawan swasta, pegawai negeri, kalangan profesi, mahasiswa dan pelajar diwajibkan ikut penataran P4.

Munculnya Komunisme di TimTim yang dipelopori oleh Fretilin merupakan ancaman serius terhadap Pancasila, dan konsekuensinya harus ada upaya *containment* dari Indonesia, demikian pandangan elite OrBa saat itu. Apalagi sejarah mencatat bangsa Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dua kali bangsa Indonesia dikhianati oleh PKI, yaitu: Pertama, tahun 1948 disaat bangsa Indoensia sibuk menghadapi agresi Belanda, dan kedua tahun 1965 disaat bangsa Indonesia sedang sibuk menghadapi pertikaian politik di dalam negeri. Dilihat dari fakta tersebut keberadaan Komunisme selalu menjadi ancaman, khususnya disaat bangsa Indonesia sedang mengalami persoalan, maka kekuatan Komunis akan memanfaatkan kesempatan untuk tujuan-tujuan politiknya.

Containment juga dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan nasional Indonesia. Seperti diketahui perang saudara di TimTim telah mendorong arus pengungsi besar-besaran ke Indonesia, yang diperkirakan sebanyak 40.000 pengungsi masuk kewilayah Indonesia untuk menyelamatkan diri dari kekejaman perang (Lapian: 1988). Yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Indonesia saat itu adalah penyusupan orang-orang Fretilin ke wilayah Indonesia dengan Komunismenya, dan selanjutnya membangun kekuatan di wilayah Indonesia, dan dalam jangka panjang melakukan gerilya untuk menciptakan gangguan keamanan di Indonesia, karena sifat mereka yang progresif tentu mereka juga memiliki motivasi untuk segera mengkomunikasikan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan Cina saat Perang Dingin yang mengumandangkan gagasan Perang Pembebasan Rakyat, dimana Cina membantu pemberontakan Komunis di Asia Tenggara, dengan tujuan mengkomunikasikan kawasan ini.

Negara Komunis TimTim juga dapat menjadi tempat berpijak kepentingan negara-negara Komunis besar seperti Cina dan Uni Soviet, karena posisinya yang berada di kawasan Indonesia, maka memudahkan negara-negara besar memperjuangkan kepentingannya di Indonesia. Situasi ini sangat merugikan Indonesia, karena musuh-musuh Indonesia dapat memantau situasi Indonesia dengan mudah melalui keberadaan negara TimTim tersebut. Bahkan sistem pertahanan Indonesia dapat dideteksi melalui TimTim, dengan demikian kerahasiaan militer Indonesia dapat diketahui oleh lawan-lawan politiknya. Padahal kerahasiaan militer memiliki arti penting untuk menguasai Indonesia, karena dalam perang modern biasanya bersandar kepada data-data dan informasi persenjataan negara lawan.

3. Integrasi TimTim ke Indonesia

Dalam perspektif *containment* kebijakan integrasi merupakan suatu strategi untuk membendung Komunisme dalam skala maksimal, karena dengan melakukan integrasi ini Indonesia secara teori dapat mengeliminir keberadaan Komunisme di TimTim. Konsekuensi dari integrasi TimTim kedalam wilayah Indonesia, maka di TimTim berlaku hukum Indonesia seperti wilayah Indonesia lainnya, dengan demikian keberadaan Komunis di TimTim juga tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan hukum Indonesia melarang ajaran Komunis.

Konsekuensi lain dari integrasi adalah Indonesia dapat melakukan langkah-langkah pengamanan guna menghindari anarki yang berlarut-larut di TimTim. Dalam pandangan elite OrBa dengan adanya integrasi TimTim tahun 1976, maka secara de facto TimTim sudah menjadi bagian dari Indonesia, gangguan keamanan di wilayah tersebut menjadi tanggung-jawab Pemerintah Indonesia, dengan kata lain persoalan yang muncul di TimTim menjadi persoalan intern

Indonesia.

Namun secara de jure keberadaan TimTim belum menjadi bagian dari Indonesia, karena masyarakat internasional banyak yang belum mengakui integrasi tersebut. Bahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa belum menghapus masalah TimTim dari agenda persidangnya. Diplomasia Indonesia tidak mampu membendung diplomasi Portugal dan Pemimpin Fretilin dipengasingan yaitu Ramos Horta yang selalu memojokkan Indonesia dalam kasus TimTim, apalagi diplomasi Portugal tersebut didukung oleh Uni Eropa yang memiliki pengaruh besar di forum internasional.

Pemulihan keamanan juga merupakan aspek penting membangun citra keberhasilan Indonesia dalam melakukan integrasi, karena jika Indonesia tidak mampu memulihkan keamanan di TimTim, maka hal ini bisa diinterpretasikan Indonesia gagal dalam melakukan integrasi, dan jika hal ini terjadi maka peluang Portugal dan negara-negara yang anti Indonesia semakin besar untuk menyudutkan Indonesia, dengan demikian masalah TimTim semakin menjadi beban bagi Indonesia di dalam pergaulan internasional.

Padahal sampai hari ini situasi keamanan di TimTim belum seutuhnya terkendali. Karena terkadang kekuatan Fretilin melakukan gangguan keamanan kepada rakyat TimTim, walaupun menurut penjelasan TNI kekuatan mereka sudah sangat kecil baik dari personal maupun persenjataannya. Tetapi sekecil apapun gangguan mereka terhadap keamanan di TimTim telah mengundang perhatian dunia internasional, karena media massa luar negeri dengan bersemangat akan memberitakannya, apalagi jika sampai terjadi bentrokan dan menelan korban, maka hal ini mendorong pemberitaan yang besar-besaran oleh kantor berita asing.

Keamanan juga merupakan prasyarat pelaksanaan pembangunan dan investasi di TimTim. Sulit melaksanakan pembangunan sektor transportasi, pendidikan, maupun perdagangan, karena mereka tidak berani untuk melaksanakan pembangunan di sektor-sektor tersebut seandainya tidak ada jaminan keamanan. Demikian pula investor juga tidak berani menamakan modalnya di wilayah yang tidak aman, karena jika terjadi kerusuhan dan mereka terancam dengan kerusuhan tersebut, maka mereka akan kehilangan modalnya, tidak mengherankan banyak investor nasional atau asing yang belum tertarik menanamkan modalnya di TimTim, karena keamanan belum sepenuhnya bisa dijamin.

Integrasi TimTim ke dalam wilayah Indonesia adalah atas kehendak rakyat TimTim sendiri yang diwakili oleh sejumlah kekuatan politik disana, yaitu: Apodeti, UDT, Kota, Tralibhista, khusus Apodeti sejak awal garis politiknya ingin berintegrasi dengan Indonesia. Aspirasi politik mereka bisa dilihat dari deklarasi Balibo yang diikrarkan tahun 1975, sebagai berikut: 1). Mereka berpendapat sesungguhnya rakyat TimTim dan rakyat Indonesia bersaudara, tetapi penjajahanlah yang telah memisahkan mereka, dalam hal ini rakyat Timor dijajah Portugal,

sedangkan rakyat Indonesia dijajah Belanda. 2). Oleh karena itu, sikap politik mereka yang dianggap tepat adalah berintegrasi dengan Indonesia (Lapian: 1988). Demikian sebagian dari pernyataan atau deklarasi Balibo, kemudian deklarasi tersebut dipandang sebagai dasar keinginan rakyat TimTim untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Di lain pihak sikap resmi Indonesia pertama kali diumumkan sesudah sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 1974, sebagai berikut: 1). Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial, dan 2). Indonesia juga menghormati hak rakyat Timor Portugis untuk menentukan nasibnya sendiri (Lapian: 1988). Indonesia sesungguhnya punya kepentingan dengan integrasi tersebut, karena Indonesia akan menjalankan *containment*. Deklarasi ini mendorong Indonesia meningkatkan bantuan sukarelawannya ke TimTim, karena memang kehadiran sukarelawan tersebut dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara mereka.

Rex Sydell adalah seorang warga Australia yang memberi kesaksian atas pengiriman sukarelawan dan integrasi TimTim. Sydell mengelola usaha perkebunan di Los Palos, TimTim, menurut pengakuannya dia melihat sendiri rakyat TimTim mengundang sukarelawan Indonesia guna memulihkan keamanan di TimTim (Antara: 3/ 1976). Mereka menginginkan agar para sukarelawan Indonesia memberi perlindungan kepada rakyat TimTim dari kekejaman kekuatan Fretilin.

Sydell juga menjadi saksi dari dukungan rakyat terhadap kekuatan gabungan yang didukung sukarelawan tersebut. Menurut Sydell rakyat bergembira ketika kekuatan gabungan berhasil membebaskan kota Dili dari kekuasaan kekuatan Fretilin, untuk mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, mereka pergi ke gereja ditengah malam untuk berdo'a dan memuji Tuhan. Selain itu mereka juga menari-nari di tepi jalan sebagai ekspresi menerima pembebasan tersebut (Antara: 3/1976).

Jadi sebenarnya integrasi TimTim ke wilayah Indonesia, walaupun merupakan bagian dari *containment* terhadap Komunisme tetapi mendapat dukungan rakyat TimTim, seperti bunyi peribahasa kebijakan Indonesia terhadap TimTim "tidak bertepuk sebelah tangan", malah sebaliknya kebijakan tersebut "bagaikan gayung bersambut," atau memperoleh tang-gapan positif dari rakyat TimTim. Hanya sayangnya elite OrBa dan elite TimTim saat itu terlalu optimis atas integrasi tersebut, karena memang kedua pihak menghendaknya, konsekuensi rasa optimis tersebut mereka membatalkan rencana referendum yang semula dijadwalkan pada tahun 1976. Para elite politik atau Pemerintah Sementara TimTim (PSTT) dan Pemerintah Indonesia lebih memilih melakukan integrasi kepada Indonesia tanpa referendum, dengan alasan referendum 1 (satu) orang untuk 1 (satu) suara sulit dilaksanakan di TimTim, karena tingkat kecerdasan yang sangat lemah

akibat penjajahan selama 5 (lima) abad oleh Portugal (AB: 5/1976), mereka memi-lih sistem perwakilan dalam bentuk petisi untuk integrasi TimTim ke Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan integrasi tersebut pada tanggal 17 Juli 1976, yang ditandai oleh pidato pengesahan integrasi tersebut dengan menetapkan TimTim sebagai propinsi ke 27 Indonesia.

5. Referendum

Pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan di era reformasi memberi kebijakan referendum kepada rakyat TimTim pada tanggal 30 Agustus 1999. Fakta ini merupakan perubahan kebijakan Indonesia dan Amerika dari *containment* menuju *self-determination*, yakni dari pembendungan atas munculnya negara Komunis di TimTim berubah menuju kebijakan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat TimTim, dengan dua pilihan, sebagai berikut: 1). Tetap bergabung dengan Indonesia dengan memiliki otonomi luas, 2). Menjadi negara merdeka, melepaskan diri dari Indonesia dengan damai dan terhormat.

Dari sudut Indonesia reformasi menjadi faktor yang mempengaruhi berakhirnya *containment* tersebut. Sejak munculnya gerakan reformasi isu mengenai bahaya laten Komunis melemah dibanding dimasa OrBa. Bahkan Pemerintahan Presiden Habibie dalam mencari dukungan politik dalam dan luar negeri telah membebaskan sejumlah tahanan politik, termasuk tahanan politik yang terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia tahun 1965. Bahkan didalam era reformasi ini bermunculan gerakan-gerakan politik yang terkesan memiliki faham sosialis, hal ini tentu tidak akan terjadi semasa Pemerintahan Orba.

Kebijakan politik Presiden Habibie tersebut merupakan tuntutan dari reformasi yaitu pemberdayaan hak-hak rakyat atau demokratisasi. Karena selama Pemerintahan Presiden Soeharto kebijakan politiknya terhadap rakyat adalah depolitisasi, yakni menjauhkan rakyat dari kehidupan politik, dengan menggantikannya dengan isu pembangunan. Dengan demikian keberadaan demokrasi juga terancam, karena rakyat tidak diarahkan untuk memiliki peran dalam proses politik. Rakyat lebih berperan sebagai objek politik dibanding sebagai subjek politik, rakyat hanya melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh elite politik. Kebijakan Publik baik ditingkat nasional maupun lokal lebih banyak diputuskan oleh Pemerintah Pusat, perimbangan politik antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak berjalan, karena Pemerintah Pusat mendominasi struktur politik.

Reformasi juga menjadi kesempatan bagi daerah untuk menuntut beberapa aspek hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni aspek otonomi daerah, perimbangan keuangan, dan pengelolaan sumberdaya alam. Daerah yang terlihat keras dalam memperjuangkan aspirasinya adalah Aceh, Irian Jaya, Riau, dan Timor Timur (TimTim).

Bagi masyarakat TimTim yang menginginkan kemerdekaan atau tidak puas dengan keadaan sekarang, era reformasi ini menjadi kesempatan baik untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya. Seperti diketahui aspirasi rakyat TimTim terbagi dua, yaitu: Pro kemerdekaan, dan Pro otonomi. Pemerintah Habibie menangkap aspirasi mereka dan masyarakat internasional melalui referendum yang melibatkan pengawas dari Perserikatan Bangsa-bangsa/UNAMET (*United Nations Mission for East Timor*)

Keberadaan dua kelompok masyarakat tersebut sebagai indikasi tetap berkembang perbedaan orientasi politik rakyat TimTim, kelompok Pro kemerdekaan menunjukkan suatu tuntutan ekstrim atau maksimal terhadap status politik TimTim. Mereka menganggap persoalan TimTim belum selesai, walaupun dilain pihak mereka juga menyadari bahwa pembangunan di TimTim sejak berintegrasi dengan Indonesia jauh lebih baik dibanding di era kolonial, mereka yang menginginkan kemerdekaan antara lain kelompok Fretilin dan pendukungnya. Kelompok ini juga terdiri dari mereka yang dalam perkembangannya kurang puas dengan apa yang dicapai setelah berintegrasi dengan Indonesia. Mereka sebenarnya pada awalnya pendukung integrasi tetapi kemudian berubah, dan menyatakan dukungannya kepada kelompok pro kemerdekaan, mereka yang ada dalam kelompok ini antara lain mantan Gubernur TimTim Mario Carascalao.

Sedangkan bagi pro otonomi luas persoalan TimTim merupakan persoalan dalam negeri Indonesia, karena masalah TimTim dianggap sudah selesai sejak integrasi tahun 1976. Mereka menilai aspirasi pro kemerdekaan tidak mewakili aspirasi rakyat TimTim, mereka juga menilai kelompok pro kemerdekaan sebagai petualang politik yang mengatas namakan rakyat TimTim, dalam kelompok ini termasuk diantaranya Arnaldo dos Reis Araujo dan mereka yang tergabung dalam Apodeti.

Dari sudut Amerika doktrin Clinton dan berakhirnya Perang Dingin menjadi penyebab perubahan *containment* menuju *self determination* atau referendum di TimTim. Doktrin ini adalah prinsip-prinsip kebijakan politik Presiden Clinton yang disampaikan saat kampanye pemilihan Presiden tahun 1994, Doktrin ini memuat hal-hal sebagai berikut: 1). Restrukturisasi sistem pertahanan dan keamanan, 2). Peningkatan kekuatan ekonomi, dan 3). Perluasan nilai-nilai demokrasi (Brinkley:1997). Prinsip-prinsip tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika, khususnya dalam masalah TimTim.

Prinsip perluasan nilai-nilai demokrasi menjadi inspirasi bagi Amerika untuk meninggalkan *containment*, dan menggantinya dengan *self determination* di TimTim, karena pada kenyataannya masalah TimTim sampai sekarang juga belum selesai. Prinsip kebijakan luar negeri Amerika ini juga dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (1987) bahwa kebijakan luar negeri Amerika pada dasarnya merupakan upaya perluasan nilai-nilai Amerika, tentu didalamnya termasuk nilai-nilai

demokrasi.

Perluasan nilai-nilai demokrasi ini sebagai manifestasi dari keyakinan rakyat Amerika, bahwa dirinya sebagai masyarakat pilihan (*the chosen people*), sehingga memiliki tugas membina peradaban manusia didunia, termasuk di dalamnya membina kehidupan demokrasi di TimTim, hal ini dilakukan dengan melakukan kebijakan *self determination* atau referendum, karena dalam pandangan rakyat Amerika hal ini merupakan cara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Setelah berakhirnya Perang Dingin *containment* terhadap TimTim merupakan sikap yang kurang relevan. Seperti diketahui Amerika dewasa ini memiliki peran sebagai negara adidaya tunggal, setelah Uni Soviet dan sejumlah negara Eropa Timur bubar, sekarang mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi, mereka umumnya sedang melakukan perubahan dari ekonomi yang bercirikan sosialis kepada ekonomi yang berciri kapitalis dengan mekanisme pasarnya. Cina juga negara Komunis yang semasa era Perang Dingin cukup agresif menyebarkan Komunisme, kini sedang melakukan konsolidasi politik, bahkan keberadaan Komunisme di Cina dewasa ini dipandang hanya sebagai alat pemersatu. Cina tidak ingin mengalami perpecahan seperti Uni Soviet, karena kesalahan didalam melakukan pembaruan di negaranya. Cina melakukan pembaruan dengan cara yang khas, dibidang politik Cina tetap menggunakan Komunisme, sedangkan dibidang ekonomi menggunakan Liberalisme dengan mekanisme pasarnya.

6. Penutup

Kebijakan *containment* yang dilakukan oleh Amerika dan Indonesia terhadap kemungkinan munculnya negara Komunis TimTim merupakan upaya membandung kekuatan Komunis yang diperhitungkan mengancam kepentingan kedua negara tersebut.

Bagi Indonesia kehadiran negara Komunis yang sangat berdekatan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Kekuatan Komunis tersebut dikhawatirkan melakukan penyusupan melalui perbatasan dan akan menimbulkan gangguan keamanan dan stabilitas di wilayah Indonesia, khususnya yang berdekatan dengan TimTim seperti Nusa Tenggara dan Bali, padahal Bali memiliki kemampuan mendatangkan devisa melalui sektor pariwisata.

Indonesia juga mengkhawatirkan keberadaan negara tersebut akan mengancam ideologi pancasila, karena Komunisme memiliki sikap bertentangan dengan Pancasila, dan disisi lain Komunisme memiliki sifat radikal dan progresif dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya, OrBa melihat hal ini merupakan ancaman yang dapat membahayakan Pancasila.

Sedangkan bagi Amerika kehadiran negara Komunis tersebut merupakan

ancaman terhadap perimbangan kekuatan barat dan timur di kawasan Asia Pasifik saat itu. Karena Amerika memperkirakan negara Timor yang baru berdiri dengan mudah berada di bawah pengaruh Uni Soviet atau Cina, yang pada gilirannya hal ini akan merugikan kepentingan Amerika dalam persaingan politik global. Mengingat saat itu dunia masih didominasi oleh Perang Dingin antara kubu Amerika dan Uni Soviet, atau kubu Liberal dan Komunis.

Sekarang suasana sudah berubah, Indonesia mengalami reformasi sejak 1998, yakni sejak pergantian pemimpin dari Soeharto kepada Habibie, dan Perang Dingin telah usai setelah bubarnya Uni Soviet sejak 1990, kedua hal ini menjadi pendorong dilaksanakannya self determination di Timor. Indonesia memang harus menghormati apapun hasil referendum di Timor, namun yang perlu dicatat Indonesia telah melakukan kesalahan saat menjelang integrasi tahun 1976, yakni dibatalkannya rencana referendum pada saat itu, karena rendahnya tingkat kecerdasan rakyat dan dikhawatirkan tidak mampu melaksanakan hak pilihnya (AB: 1976), walaupun ini mungkin keinginan rakyat Timor melakukan integrasi dengan Indonesia tanpa referendum, tetapi Indonesia sebagai negara yang sudah berpengalaman dalam masalah demikian yaitu pernah melakukan referendum di Irian Jaya yang masyarakatnya juga terbelakang, seharusnya Indonesia menolak keinginan integrasi tanpa referendum tersebut, apalagi jika integrasi tanpa referendum tersebut merupakan keinginan Indonesia, maka Indonesia sesungguhnya telah melakukan kesalahan, karena Indonesia telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang universal dan kemudian hal ini akhirnya menjadi ganjalan Indonesia di forum internasional.

Daftar Pustaka

A.B. Lopian.

1988 *Timor Timur dalam Gerak Pembangunan*. Jakarta. Depdikbud.
Dirjen Sejarah dan Nilai-nilai tradisional

Brinkley, Douglas.

1987 "Democratic Enlargement: the Clinton Doctrine." *Foreign Policy*. Ed. Charles William Magnes. Washington. The Carnegie Endowment for International Peace.

Huntington, Samuel P.

1982 *American Politics: The Promise of Disharmony*. Massachusett.
The Belknap Press.

Hassan Shadily.

1990 "Timor Timur." *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia

- 1994 *Hari-hari Terakhir Timor Portugis*. Jakarta. Pustaka Jaya
- Morgenthau, Hans.J.
1962 *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace*.
New York. Alfred A. Knopf.
- Tindall, George Brown.
1984 *American a Narrative History*. Vol.1. New York. W.W. Norton &
Company
- 1989 "Timor Timur Setelah Petrodolar". *Australia di Mata Indone-*
sia. Ed. Philips Kitley. Jakarta. PT.Gramedia
- 1983 "Integrasi Timor Timur". (*Centre for Strategic and Interna-*
tional Studies)

